



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL KADIR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **518860**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.041.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 501 m2/426 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.252.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 758 m2/200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 2880 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 2188 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 109.400.000
5. Tanah Seluas 789 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 376.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.050.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.441.450.000



III. HUTANG

Rp. 90.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.351.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.